

Kewajiban Filial dan Ketidakadilan Warisan terhadap Anak Perempuan Perawat

¹Habib Ismail, ²Didik Kusno Aji Nugroho, ³Mufid Arsyad, ⁴Muhammad Anjas

^{1,2,3,4}Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

Email: habibismail@umala.ac.id

ABSTRACT

This study examines the relationship between filial obligation and inheritance inequality experienced by daughters as caregiving daughters in Muslim families from a gender perspective. It aims to analyze the social construction of filial obligations, the recognition of caregiving contributions, and the reproduction of gender inequality in inheritance practices. The study employs an empirical legal approach using qualitative methods in Central Lampung Regency, East Lampung Regency, and Metro City, Indonesia. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis and were analyzed using Filial Obligation Theory, Patriarchy Theory, Distributive Justice Theory, and the concept of living law. The findings indicate that filial obligations have become feminized through patriarchal norms that position daughters as the primary caregivers for aging parents. Although they devote substantial time, effort, health, and economic resources to caregiving, care work is generally regarded as a moral obligation rather than an economic contribution relevant to inheritance distribution. This practice reveals a gap between formal justice based on heirship status and substantive justice based on actual contributions to family welfare. This study introduces the concept of Caregiving-Based Inheritance Inequality, referring to inheritance injustice arising from the failure to recognize caregiving contributions. The findings advocate for the development of more gender-responsive inheritance law by integrating the value of care work as a consideration of substantive justice within the family.

Keywords: Distributive Justice, Inheritance Inequality, Obligation of Filial Piety.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji hubungan antara *filial obligation* dan ketidakadilan waris yang dialami anak perempuan sebagai *caregiving daughters* dalam keluarga Muslim dari perspektif gender. Penelitian bertujuan menganalisis konstruksi sosial kewajiban berbakti, pengakuan terhadap kontribusi perawatan, dan reproduksi ketimpangan gender dalam praktik pewarisan. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, dan Kota Metro. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis menggunakan Teori *Filial Obligation*, Teori Patriarki, Teori Keadilan Distributif, dan konsep *living law*. Kewajiban berbakti kepada orang tua mengalami feminisasi melalui norma patriarkal yang menempatkan anak perempuan sebagai pengasuh utama. Meskipun mereka mencurahkan waktu, tenaga, kesehatan, dan sumber daya ekonomi, *care work* dipandang sebagai kewajiban moral, bukan kontribusi ekonomi yang relevan dalam pembagian warisan. Praktik tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara keadilan formal berbasis status ahli waris dan keadilan substantif berbasis kontribusi nyata. Penelitian memperkenalkan konsep *Caregiving-Based Inheritance Inequality* sebagai bentuk ketidakadilan waris akibat tidak diakuinya kontribusi perawatan. Temuan ini mendorong pengembangan hukum waris yang lebih responsif gender dengan mengintegrasikan nilai *care work* sebagai pertimbangan keadilan substantif dalam keluarga.

Kata Kunci: Kewajiban Berbakti kepada Orang Tua, Ketidakadilan Waris, Keadilan Distributif.

A. Pendahuluan

Penuaan penduduk dan meningkatnya angka penyakit kronis di Indonesia telah menjadikan perawatan lanjut usia (*elderly care*) sebagai salah satu tantangan utama dalam keluarga Muslim kontemporer.¹ Dalam banyak keluarga, kebutuhan perawatan sehari-hari terhadap orang tua yang sakit atau lanjut usia tidak diserahkan kepada lembaga formal, melainkan dipikul oleh anggota keluarga sendiri.² Dalam tradisi Islam, tanggung jawab tersebut berakar pada konsep *birr al-wālidayn* yang menempatkan penghormatan dan pengabdian kepada orang tua sebagai kewajiban moral dan spiritual yang sangat tinggi kedudukannya.³ Akan tetapi, dalam realitas sosial, kewajiban tersebut tidak dijalankan merata oleh seluruh anak. Terdapat kecenderungan kuat bahwa tugas perawatan fisik, emosional, dan ekonomi terhadap orang tua lebih banyak dibebankan kepada anak perempuan dibandingkan anak laki-laki.

Fenomena tersebut terlihat jelas dalam masyarakat Muslim di Provinsi Lampung. Hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, dan Kota Metro menunjukkan bahwa praktik *caregiving* keluarga masih sangat dipengaruhi oleh konstruksi gender yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang dianggap paling bertanggung jawab dalam urusan pengasuhan dan perawatan. Dari 3 kasus *caregiving* yang berhasil dihimpun, terdiri atas 1 kasus di Lampung Tengah, 1 kasus di Lampung Timur, dan 1 kasus di Kota Metro, sebagian besar perawat utama (*primary caregiver*) adalah anak perempuan. Mereka merawat orang tua yang sakit selama bertahun-tahun, mendampingi pengobatan, memenuhi kebutuhan harian, menyediakan dukungan psikologis, bahkan menanggung biaya hidup ketika sumber ekonomi orang tua tidak lagi mencukupi. Sebaliknya, keterlibatan anak laki-laki dalam proses perawatan relatif lebih rendah meskipun mereka tetap memiliki posisi yang kuat dalam struktur kepemilikan dan pewarisan keluarga.

Ironisnya, pengorbanan besar yang diberikan anak perempuan tersebut sering kali tidak memperoleh pengakuan ketika keluarga memasuki fase pembagian warisan. Temuan lapangan menunjukkan adanya pola ketimpangan yang berulang. Dalam banyak kasus, aset-aset strategis keluarga seperti tanah, rumah, kebun, maupun harta adat tetap dikuasai atau diprioritaskan kepada ahli waris laki-laki, sementara anak perempuan yang selama bertahun-tahun menjalankan fungsi *caregiving* hanya memperoleh bagian yang sama, bagian yang lebih kecil, atau bahkan tidak mendapatkan akses terhadap aset produktif sama sekali. Kondisi ini

¹ Richard Schulz et al., "Family Caregiving for Older Adults," *Annual Review of Psychology* 71, no. 1 (2020): 635–59.

² Scott R Beach and Richard Schulz, "Family Caregiver Factors Associated with Unmet Needs for Care of Older Adults," *Journal of the American Geriatrics Society* 65, no. 3 (2017): 560–66.

³ Abidah R Delu, "Women's Strategies For Negotiating Gender Socialization Based On Religious Values In The Modern Family," *Referensi Islamika: Jurnal Studi Islam* 4, no. 2 (2026): 264–77.

menunjukkan adanya kesenjangan antara kontribusi nyata yang diberikan selama kehidupan orang tua dengan distribusi hak ekonomi yang diterima setelah pewaris meninggal dunia.

Fenomena tersebut memperlihatkan paradoks serius dalam sistem kewarisan. Di satu sisi, anak perempuan dituntut untuk menjalankan kewajiban filial sebagai bentuk bakti kepada orang tua. Namun di sisi lain, pengorbanan yang mereka lakukan tidak memiliki nilai yuridis dalam sistem distribusi warisan. Dengan kata lain, kerja perawatan (*care work*) yang menghabiskan waktu, tenaga, kesehatan, dan peluang ekonomi dianggap sebagai kewajiban moral semata tanpa konsekuensi hukum terhadap pembagian harta peninggalan. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan antara beban yang dipikul dan manfaat ekonomi yang diperoleh. Secara normatif, sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia belum menyediakan instrumen yang memadai untuk mengakomodasi kontribusi *caregiving* sebagai variabel dalam distribusi warisan. Hukum kewarisan Islam melalui ketentuan *faraidh* menempatkan hubungan nasab sebagai dasar utama penentuan hak waris.⁴

Demikian pula Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bagian anak laki-laki sebesar dua kali bagian anak perempuan tanpa mempertimbangkan tingkat kontribusi masing-masing ahli waris terhadap orang tua selama hidupnya.⁵ Dalam praktik masyarakat Lampung, kondisi tersebut diperkuat oleh sistem adat yang masih bercorak patriarkal, baik dalam tradisi *Pepadun* maupun *Saibatin*, yang cenderung menempatkan laki-laki sebagai pewaris utama aset keluarga.⁶ Akibatnya, anak perempuan *caregiver* menghadapi ketidakadilan berlapis: tidak hanya terbebani oleh pekerjaan perawatan yang tidak dibayar (*unpaid care work*), tetapi juga mengalami marginalisasi dalam distribusi kekayaan keluarga.

Dari perspektif gender, kondisi ini merupakan manifestasi nyata dari fenomena *double burden* yang menempatkan perempuan pada tanggung jawab domestik dan perawatan keluarga secara tidak proporsional. Perempuan dibebani tanggung jawab perawatan karena konstruksi sosial yang memandang aktivitas tersebut sebagai bagian dari kodrat perempuan. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa *unpaid care work* perempuan memberikan kontribusi penting terhadap perekonomian dan kesejahteraan keluarga, tetapi kontribusi tersebut sering tidak dapat diukur melalui pendapatan sehingga kurang memperoleh pengakuan

⁴ Habib Ismail, Hasyim Asy'ari, and Agus Setiawan, "Hak Waris Anak Laki-Laki Tertua Dalam Hukum Adat Lampung Pepadun Perspektif Gender (Studi Di Tegineneng Kabupaten Pesawaran)," *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2019): 56–67.

⁵ Husain Fadhil Arrasyid, Habib Shulton Asnawi, and Habib Ismail, "Nilai-Nilai Falsafah Jawa Sepikul Segendongan Terhadap Dinamika Pembagian Waris Perspektif Teori Hudud (Studi Kasus Di Desa Balekencono Kecamatan Batanghari)," *Berkala Hukum, Sosial Dan Agama* 2, no. 1 (2025): 200–211.

⁶ Linda Firdawaty, Habib Shulton Asnawi, and Siti Mahmudah, "Semanda Lekok in the Sai Batin Community, Lampung: Wife's Domination of Marital Assets from Maqāṣid Al-Sharī'ah Perspective," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 3 (2024): 1734–62.

ekonomi.⁷ Sejalan dengan itu, Bueno dan Chase (2023) melalui *systematic review* menemukan bahwa perempuan yang menjalankan peran sebagai *family caregiver* cenderung mengalami beban psikososial yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yang menunjukkan bahwa caregiving merupakan praktik yang memiliki dimensi gender yang kuat.⁸ Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa anak perempuan tidak hanya menjalankan kewajiban filial, tetapi juga menanggung biaya sosial, emosional, dan ekonomi dari pekerjaan perawatan yang tidak dibayar. Hasil wawancara menunjukkan bahwa seorang informan merawat ibunya hingga wafat, memenuhi kebutuhan ketika sumber ekonomi orang tua tidak mencukupi, tetapi tetap menerima bagian warisan yang sama dengan saudara yang tidak terlibat dalam perawatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *care work* perempuan dinaturalisasi sebagai kewajiban moral sehingga kehilangan nilai ekonominya ketika harta keluarga didistribusikan.

Dampak ketidakadilan tersebut tidak berhenti pada aspek ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan struktur kekuasaan dan norma pewarisan yang hidup dalam keluarga. Rahmayanty dkk., menunjukkan bahwa sistem kekerabatan patrilineal cenderung menempatkan laki-laki pada posisi dominan dan dalam praktik pewarisan lebih mengutamakan laki-laki dibandingkan perempuan, sementara kuatnya kepatuhan terhadap hukum adat menjadi salah satu faktor yang mempertahankan ketimpangan tersebut.⁹ Temuan tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu bahwa distribusi aset keluarga masih dipengaruhi oleh struktur patriarkal dan status gender, meskipun perempuan telah memberikan kontribusi besar terhadap keberlangsungan keluarga. Namun demikian, penelitian terdahulu belum secara khusus menjelaskan hubungan antara kewajiban filial, feminisasi *care work*, dan ketidakadilan dalam pembagian warisan. Dengan demikian, terdapat *research gap* pada belum terintegrasinya dimensi caregiving ke dalam analisis ketidakadilan waris. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menunjukkan bahwa ketidakadilan waris terhadap anak perempuan bukan semata-mata terjadi pada saat distribusi harta, tetapi telah terbentuk melalui proses panjang berupa pembebanan kewajiban perawatan yang tidak proporsional dan tidak diikuti pengakuan ekonomi. Atas dasar itu, penelitian ini memperkenalkan konsep *Caregiving-Based Inheritance Inequality* sebagai bentuk ketidakadilan waris yang lahir dari tidak diakuinya kontribusi *care work* dalam distribusi sumber daya keluarga.

⁷ Ruth Meilianna, Marya Yenita Sitohang, and Yulinda Nurul Aini, "Gender Inequality, Unpaid Care Work, And Working Women: Strengthening Indonesian Women's Role Within The Family Economy," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 24, no. 1 (2025): 120–32.

⁸ Michael V Bueno and Jo-Ana D Chase, "Gender Differences in Adverse Psychosocial Outcomes among Family Caregivers: A Systematic Review," *Western Journal of Nursing Research* 45, no. 1 (2023): 78–92.

⁹ Dinny Rahmayanty et al., "Ketidaksetaraan Gender Dalam Sistem Patrilineal," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 6513–22.

Dalam perspektif keadilan distributif, kondisi anak perempuan *caregiver* dapat dianalisis melalui prinsip *difference principle* John Rawls, yang mensyaratkan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung (*least advantaged*).¹⁰ Dalam konteks penelitian ini, prinsip tersebut relevan untuk membaca ketidakseimbangan antara beban perawatan yang ditanggung anak perempuan dan manfaat ekonomi yang mereka terima dalam distribusi harta keluarga. Anak perempuan yang menjalankan *caregiving* dalam jangka panjang dapat kehilangan kesempatan ekonomi, waktu produktif, dan peluang pengembangan diri, sehingga pengalaman tersebut perlu dianalisis sebagai bagian dari struktur distribusi manfaat dan beban dalam keluarga, bukan semata-mata sebagai kewajiban moral. Dengan demikian, persoalan yang muncul bukan sekadar apakah bagian warisan telah diberikan sesuai aturan formal, tetapi apakah praktik distribusi tersebut mampu menghasilkan keadilan substantif ketika terdapat perbedaan kontribusi dan beban antaranggota keluarga.

Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, pembahasan keadilan waris juga dapat dikaitkan dengan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya orientasi terhadap keadilan sosial dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*). Penelitian Heriandita dkk., menunjukkan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* dapat digunakan untuk menganalisis persoalan keadilan sosial bagi perempuan dalam hukum waris, terutama ketika norma formal berhadapan dengan persoalan patriarki dan perubahan peran perempuan dalam keluarga.¹¹ Dengan kerangka tersebut, kontribusi *caregiving* tidak serta-merta diposisikan sebagai dasar untuk mengubah bagian *farā'id*, tetapi sebagai fakta sosial yang penting dalam menilai apakah distribusi harta keluarga telah mencerminkan keadilan dan kemaslahatan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menjelaskan kesenjangan antara keadilan formal berdasarkan status ahli waris dan keadilan substantif yang mempertimbangkan kondisi, beban, dan kontribusi nyata anggota keluarga.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini mengajukan tiga pertanyaan penelitian: (1) bagaimana kewajiban filial dikonstruksikan dan dibebankan kepada anak perempuan sebagai *caregiver* dalam keluarga Muslim? (2) bagaimana kontribusi *caregiving* anak perempuan memperoleh atau tidak memperoleh pengakuan dalam pembagian warisan? dan (3) bagaimana praktik tersebut mereproduksi ketimpangan gender dalam distribusi warisan keluarga? Ketiga pertanyaan tersebut menjadi dasar analisis penelitian mengenai konstruksi kewajiban filial, pengakuan kontribusi *caregiving*, dan mekanisme reproduksi ketidakadilan gender dalam pewarisan.

¹⁰ Svetoslav Ivanov Stoyanov, "A Theory of Justice of John Rawls" (NotaBene, 2022).

¹¹ Syifa Mutiara Putri Heriandita et al., "The Role of Islamic Inheritance Law with a Maqasid Al-Shariah Approach in Addressing the Challenges of Social Justice for Women," *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 10, no. 1 (2025): 231–52.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan desain kualitatif untuk menganalisis hubungan antara *filial obligation*, praktik *caregiving*, relasi gender, dan pembagian warisan dalam keluarga Muslim. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, dan Kota Metro, yang dipilih karena merepresentasikan konteks sosial-budaya keluarga Muslim di Provinsi Lampung. Unit analisis penelitian adalah praktik keluarga dalam menjalankan kewajiban perawatan orang tua dan proses pembagian harta warisan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anak perempuan yang berperan sebagai *primary caregiver* serta anggota keluarga yang terlibat dalam praktik perawatan dan pewarisan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen keluarga, dokumen pembagian warisan, serta ketentuan hukum yang relevan. Penelitian mencakup tiga kasus *caregiving*, setiap satu kasus di wilayah penelitian. Pemilihan kasus dilakukan secara purposif berdasarkan keterlibatan anak perempuan dalam perawatan orang tua dan adanya praktik pembagian warisan. Pendekatan ini sesuai dengan karakter penelitian sosio-legal yang menempatkan pengalaman dan praktik sosial sebagai sumber penting untuk memahami bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen untuk memperoleh triangulasi informasi mengenai pengalaman *caregiving*, pembagian tanggung jawab berbasis gender, pengorbanan ekonomi dan sosial, serta mekanisme pembagian warisan. Teknik wawancara digunakan untuk menggali pengalaman subjektif *caregiving daughters* dan persepsi keluarga mengenai kewajiban berbakti serta hak waris; observasi digunakan untuk memahami praktik dan relasi sosial yang menyertai proses perawatan; sedangkan analisis dokumen digunakan untuk mengidentifikasi dasar hukum dan pola distribusi warisan. Data dianalisis secara tematik melalui tahapan reduksi data, pengelompokan tema, interpretasi, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan *Filial Obligation Theory*, *Patriarchy Theory*, *Distributive Justice Theory*, dan konsep *living law* sebagai kerangka analisis. Penggunaan pendekatan kualitatif juga relevan untuk mengungkap bagaimana norma gender dan kewajiban perawatan diproduksi serta dinegosiasikan dalam keluarga.

C. Pembahasan

Konstruksi Kewajiban Filial Anak Perempuan Perawat dalam Keluarga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban filial dalam keluarga diwujudkan melalui keterlibatan anak dalam pemenuhan kebutuhan orang tua, terutama ketika orang tua berada dalam kondisi lanjut usia atau mengalami keterbatasan fisik. Kewajiban tersebut mencakup pendampingan pengobatan, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dukungan emosional,

serta bantuan finansial. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa tanggung jawab tersebut dalam praktiknya lebih banyak dijalankan oleh anak perempuan melalui keterlibatan yang intensif dan berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa *filial obligation* dalam kehidupan keluarga tidak hanya dipahami sebagai kewajiban moral untuk menghormati orang tua, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk kerja perawatan (*care work*) yang membutuhkan waktu, tenaga, dan sumber daya dari anak yang menjalankannya.¹²

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kewajiban filial dalam masyarakat Lampung tidak sekadar dipahami sebagai tanggung jawab moral seluruh anak, tetapi telah mengalami diferensiasi berbasis gender. Meskipun norma keluarga mengajarkan bahwa seluruh anak memiliki kewajiban berbakti kepada orang tua, praktik sosial menunjukkan bahwa anak perempuan lebih sering ditunjuk atau secara sukarela mengambil peran sebagai perawat utama. Fenomena ini sejalan dengan teori *filial obligation* yang menjelaskan bahwa kewajiban merawat orang tua dibentuk oleh norma sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat, bukan semata-mata oleh hubungan biologis antara anak dan orang tua.¹³

Dari perspektif teori patriarki Sylvia Walby, konstruksi tersebut menunjukkan bagaimana keluarga menjadi institusi yang mereproduksi pembagian kerja berbasis gender.¹⁴ Anak perempuan ditempatkan dalam ranah domestik dan kerja perawatan, sementara anak laki-laki lebih banyak dikaitkan dengan peran publik dan kepemilikan sumber daya ekonomi. Dalam konteks penelitian ini, rendahnya keterlibatan anak laki-laki dalam proses caregiving tidak mengurangi posisi mereka sebagai pihak yang tetap memiliki akses kuat terhadap kepemilikan dan pewarisan keluarga. Sebaliknya, anak perempuan yang menjalankan fungsi perawatan justru tidak memperoleh posisi tawar yang lebih besar dalam struktur keluarga.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa kewajiban filial yang dibebankan kepada anak perempuan telah mengalami proses naturalisasi. Perawatan orang tua dipersepsikan sebagai kewajiban moral perempuan sehingga pengorbanan waktu, tenaga, kesehatan, dan kesempatan ekonomi dianggap sebagai bentuk pengabdian yang tidak memerlukan kompensasi. Dalam perspektif Pierre Bourdieu, kondisi ini merupakan bentuk *symbolic domination* yang membuat ketimpangan gender diterima sebagai sesuatu yang wajar.¹⁵ Akibatnya, kerja perawatan yang sesungguhnya memiliki nilai sosial dan ekonomi tinggi berubah menjadi kewajiban yang tidak terlihat (*invisible labor*) dan kehilangan pengakuan sebagai kontribusi yang layak dihargai.

¹² Wawancara dengan Ibu Mei, *primary caregiver*, Simbarwaringin, Trimurjo, Lampung Tengah, 2026.”

¹³ Hong-Jae Park, “Does Filial Piety Still Matter? A Filiality-Based Perspective on Intergenerational Solidarity and Cooperation,” *Journal of Intergenerational Relationships* 19, no. 1 (2021): 78–91.

¹⁴ Sylvia Walby, “Varieties of Gender Regimes,” *Social Politics: International Studies in Gender, State and Society* 27, no. 3 (2020): 414–31.

¹⁵ Afua Owusu-Kwarteng et al., “A Symbolic Violence Approach to Gender Inequality in Academia,” *Gender, Work & Organization* 32, no. 1 (2025): 436–57.

Konstruksi kewajiban filial juga menunjukkan relasi kuasa yang tidak seimbang dalam keluarga. Anak perempuan dibebani tanggung jawab lebih besar dalam menjaga kesejahteraan orang tua, namun tidak memiliki otoritas yang sebanding dalam pengambilan keputusan keluarga maupun penguasaan aset keluarga. Situasi ini memperlihatkan bahwa kewajiban dan hak tidak didistribusikan secara proporsional. Perempuan menjalankan fungsi reproduktif dan perawatan yang menopang keberlangsungan keluarga, tetapi manfaat ekonomi yang muncul dari aset keluarga lebih banyak dinikmati oleh laki-laki sebagai penerus garis keturunan.

Dalam perspektif *living law*, pembebanan kewajiban filial kepada anak perempuan merupakan bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat Lampung.¹⁶ Norma tersebut tidak selalu tertulis dalam aturan adat formal, tetapi diterima dan dipraktikkan secara luas oleh keluarga. Akibatnya, masyarakat menganggap bahwa anak perempuan yang merawat orang tua telah menjalankan tugas yang memang seharusnya dilakukan, bukan sebagai bentuk kontribusi khusus yang dapat menjadi dasar pengakuan hak ekonomi. Hukum yang hidup ini memperkuat reproduksi ketimpangan gender karena menjadi dasar legitimasi sosial bagi pembagian peran yang tidak seimbang.

Berdasarkan keseluruhan temuan, dapat disimpulkan bahwa konstruksi kewajiban filial dalam keluarga Lampung dibentuk oleh interaksi antara nilai kekeluargaan, budaya patriarki, dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Kewajiban merawat orang tua tidak didistribusikan secara setara kepada seluruh anak, tetapi lebih banyak dibebankan kepada anak perempuan. Pembebanan tersebut menghasilkan beban fisik, emosional, sosial, dan ekonomi yang signifikan, namun tidak selalu diikuti dengan pengakuan hak yang proporsional. Dengan demikian, kewajiban filial dalam praktiknya berfungsi sebagai mekanisme solidaritas keluarga dan menjadi arena reproduksi ketimpangan gender yang memengaruhi posisi perempuan dalam relasi keluarga dan akses mereka terhadap sumber daya ekonomi keluarga.

Tabel 1. Analisis Konstruksi Kewajiban Filial terhadap Anak Perempuan Perawat

No	Temuan Lapangan	Analisis Teoretis	Implikasi Gender
1	Mayoritas <i>primary caregiver</i> adalah anak perempuan	Terjadi feminisasi kerja perawatan dalam keluarga	Beban caregiving lebih besar pada perempuan
2	Anak perempuan merawat orang tua dalam jangka panjang	Bentuk aktualisasi kewajiban filial dan solidaritas antargenerasi	Kehilangan waktu, tenaga, dan peluang ekonomi
3	Anak laki-laki relatif kurang terlibat dalam perawatan	Pembagian kerja berbasis patriarki	Ketimpangan distribusi tanggung jawab keluarga
4	Perawatan dianggap kewajiban moral perempuan	Terjadi naturalisasi peran gender	Kerja perawatan tidak dianggap kontribusi ekonomi
5	Pengorbanan perempuan diterima sebagai bentuk bakti	Dominasi simbolik (<i>symbolic domination</i>)	Perempuan menerima beban tanpa pengakuan yang setara

¹⁶ Rahmiati Rahmiati et al., "Banjar Customary Law as a Living Law: An Ehrlichian Analysis of Consensus-Based Dispute Resolution and Social Restoration," *Anterior Jurnal* 25, no. 1 (2026): 189–91.

6	Norma keluarga mengharapkan anak perempuan merawat orang tua	Manifestasi <i>living law</i> dalam relasi keluarga	Legitimasi sosial terhadap ketimpangan gender
7	Kontribusi caregiving tidak meningkatkan posisi tawar perempuan	Relasi kuasa patriarkal dalam keluarga	Hak dan kewajiban tidak terdistribusi secara proporsional

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2026.

Tabel 1 menunjukkan kewajiban filial dalam keluarga tidak dijalankan secara netral, melainkan dipengaruhi oleh konstruksi sosial mengenai peran gender. Data penelitian menunjukkan bahwa anak perempuan secara dominan menjadi *primary caregiver* bagi orang tua lanjut usia, sementara keterlibatan anak laki-laki relatif lebih rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab perawatan dalam keluarga tidak didistribusikan secara setara, tetapi lebih banyak dibebankan kepada perempuan. Temuan tersebut menguatkan pandangan bahwa kerja perawatan merupakan aktivitas sosial yang secara historis dilekatkan kepada perempuan dan sering dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab alamiah mereka, bukan sebagai bentuk kontribusi yang memerlukan pengakuan sosial maupun ekonomi.

Lebih lanjut, praktik perawatan yang dilakukan anak perempuan tidak hanya berupa bantuan fisik sehari-hari, tetapi juga mencakup pendampingan pengobatan, dukungan emosional, pengelolaan kebutuhan rumah tangga, hingga dukungan ekonomi ketika orang tua mengalami keterbatasan finansial. Peran yang kompleks tersebut menunjukkan bahwa kewajiban filial telah berkembang menjadi bentuk kerja reproduktif yang membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, dan sumber daya yang tidak sedikit. Namun demikian, kontribusi tersebut sering kali tidak dipandang sebagai aktivitas produktif yang memiliki nilai ekonomi. Kondisi ini sejalan dengan konsep *invisible labor*, yaitu kerja yang sangat penting bagi keberlangsungan keluarga tetapi tidak memperoleh pengakuan yang setara karena berlangsung di ruang domestik.¹⁷

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa pembebanan tanggung jawab perawatan kepada anak perempuan merupakan hasil konstruksi budaya patriarki yang telah mengakar dalam kehidupan keluarga. Dalam masyarakat yang masih dipengaruhi nilai-nilai patriarkal, perempuan diasosiasikan dengan sifat keibuan, kepedulian, dan kemampuan mengasuh, sedangkan laki-laki lebih banyak dihubungkan dengan fungsi ekonomi dan kepemimpinan keluarga. Akibatnya, ketika orang tua memasuki usia lanjut atau mengalami sakit berkepanjangan, anak perempuan menjadi pihak yang pertama kali diharapkan untuk mengambil alih tanggung jawab perawatan. Sebaliknya, rendahnya keterlibatan anak laki-laki

¹⁷ Nadya Kharima et al., *Perempuan Dalam Struktur Sosial Modern* (Star Digital Publishing, 2026).

tidak dianggap sebagai pelanggaran norma sosial karena budaya telah memberikan legitimasi yang berbeda terhadap peran laki-laki dan perempuan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pembagian tanggung jawab perawatan keluarga tidak semata-mata lahir dari pilihan individual, melainkan merupakan hasil reproduksi dominasi simbolik. Brown, melalui pembahasannya atas konsep *masculine domination* Pierre Bourdieu, menjelaskan bahwa norma gender direproduksi melalui habitus sehingga perempuan cenderung menerima beban domestik sebagai sesuatu yang alami dan sah. Akibatnya, kewajiban merawat orang tua lebih banyak dipikul oleh anak perempuan karena telah diinternalisasikan sebagai tanggung jawab moral yang sesuai dengan konstruksi gender.¹⁸ Akibatnya, pengorbanan yang dilakukan selama bertahun-tahun tidak dipandang sebagai kontribusi khusus yang dapat menjadi dasar klaim hak ekonomi, melainkan hanya sebagai bentuk bakti kepada orang tua. Dominasi simbolik ini menyebabkan ketimpangan gender dapat berlangsung secara terus-menerus tanpa banyak mendapatkan perlawanan karena dianggap sebagai bagian dari tradisi keluarga yang normal.

Selain dipengaruhi budaya patriarki, konstruksi kewajiban filial tersebut juga diperkuat oleh living *law* yang hidup dalam masyarakat. Norma yang berkembang dalam keluarga dan komunitas adat mengajarkan bahwa anak perempuan memiliki tanggung jawab lebih besar dalam menjaga dan merawat orang tua. Walaupun norma tersebut tidak selalu tertulis dalam aturan formal, ia berfungsi efektif sebagai pedoman perilaku sosial yang ditaati oleh anggota keluarga. Dalam perspektif Ehrlich, kondisi ini menunjukkan bagaimana hukum yang hidup dalam masyarakat sering kali lebih menentukan perilaku individu dibandingkan aturan hukum formal yang berlaku.¹⁹ Dengan demikian, pembebanan kewajiban filial kepada anak perempuan memperoleh legitimasi tidak hanya dari budaya patriarki, tetapi juga dari norma sosial yang hidup dalam komunitas.

Dari perspektif relasi kuasa gender, temuan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara tanggung jawab dan hak yang diterima anggota keluarga. Anak perempuan memikul beban caregiving yang lebih besar, tetapi posisi mereka dalam pengambilan keputusan keluarga maupun akses terhadap sumber daya ekonomi tidak mengalami peningkatan yang signifikan.²⁰ Sebaliknya, struktur keluarga tetap menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih kuat dalam penguasaan aset dan otoritas keluarga. Situasi ini menunjukkan bahwa kewajiban filial telah menjadi salah satu mekanisme reproduksi

¹⁸ David Brown, "Pierre Bourdieu's 'Masculine Domination' Thesis and the Gendered Body in Sport and Physical Culture," *Sociology of Sport Journal* 23, no. 2 (2006): 162–88.

¹⁹ Nugraha Gading Priandana et al., "Pendekatan Teoritik Dalam Sosiologi Hukum Terhadap Dinamika Kepatuhan Masyarakat," *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 3 (2026): 4181–88.

²⁰ Arri Handayani, *Gender, Karier, Dan Kesejahteraan Keluarga: Dinamika Perempuan Dalam Lensa Psikologi* (Deepublish, 2025).

ketimpangan gender yang bekerja melalui pembagian peran domestik dan distribusi sumber daya yang tidak seimbang.

Dengan demikian, konstruksi kewajiban filial yang dibebankan kepada anak perempuan perawat dalam keluarga tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua. Kewajiban tersebut merupakan hasil interaksi antara budaya patriarki, norma kekeluargaan, dan *living law* yang berkembang dalam masyarakat. Akibatnya, anak perempuan tidak hanya memikul tanggung jawab perawatan yang lebih besar dibandingkan saudara laki-lakinya, tetapi juga menghadapi risiko ketidakadilan ketika kontribusi tersebut tidak memperoleh pengakuan yang proporsional dalam struktur keluarga maupun dalam pembagian sumber daya ekonomi keluarga. Temuan ini menjadi dasar penting untuk memahami mengapa ketimpangan gender dalam pewarisan sering kali berakar pada proses sosial yang telah berlangsung jauh sebelum pembagian warisan dilakukan.

Kontribusi *Caregiving* Anak Perempuan Tidak Memperoleh Pengakuan yang Proporsional dalam Pembagian Warisan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan antara kontribusi caregiving yang dilakukan anak perempuan dan pengakuan yang mereka terima dalam pembagian warisan keluarga. Berdasarkan data lapangan dalam proposal penelitian, anak perempuan merupakan pihak yang paling dominan menjalankan peran sebagai *primary caregiver* bagi orang tua lanjut usia. Mereka tidak hanya memberikan dukungan emosional, tetapi juga terlibat dalam perawatan fisik, pendampingan pengobatan, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, serta dukungan ekonomi ketika orang tua mengalami penurunan kemampuan finansial. Keterlibatan tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan membutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit, baik dari segi waktu, tenaga, kesehatan, maupun kesempatan ekonomi. Namun demikian, kontribusi tersebut tidak secara otomatis memperoleh pengakuan yang sebanding dalam pembagian harta warisan keluarga.

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara beban yang ditanggung dan manfaat yang diterima oleh anak perempuan dalam struktur keluarga. Meskipun mereka menjadi pihak yang paling banyak berinteraksi dan merawat orang tua pada masa tua, pembagian warisan umumnya tetap mengikuti pola yang berorientasi pada status formal ahli waris dan tradisi keluarga. Kontribusi caregiving sering dipandang sebagai kewajiban moral yang harus dilakukan oleh anak perempuan sehingga tidak dianggap sebagai faktor yang relevan dalam menentukan hak ekonomi setelah orang tua meninggal dunia. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kerja perawatan belum memperoleh pengakuan sebagai bentuk kontribusi yang memiliki nilai sosial dan ekonomi dalam keluarga.

Tabel 2. Kontribusi *Caregiving* dalam Pembagian Warisan

No	Temuan Penelitian	Analisis Teoretis	Dampak dalam Pewarisan
1	Anak perempuan menjadi <i>primary caregiver</i> orang tua	Bentuk aktualisasi kewajiban filial	Menanggung beban perawatan terbesar
2	Perawatan dilakukan dalam jangka panjang	Bentuk investasi sosial dan emosional keluarga	Mengurangi kesempatan kerja dan pendapatan
3	Pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya tidak dihitung	Kerja perawatan dianggap kewajiban moral	Tidak diakui sebagai kontribusi ekonomi
4	Pembagian warisan tetap mengikuti pola keluarga tradisional	Dominasi keadilan formal	Kontribusi caregiving tidak menjadi pertimbangan utama
5	Anak laki-laki memperoleh hak yang relatif sama meskipun minim keterlibatan dalam perawatan	Relasi kuasa patriarkal	Ketimpangan antara kontribusi dan manfaat
6	Tidak ada mekanisme penghargaan terhadap caregiver	Absennya keadilan distributif	Muncul persepsi ketidakadilan warisan

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2026.

Berdasarkan 2, terlihat bahwa kontribusi caregiving yang diberikan anak perempuan belum mendapatkan pengakuan yang proporsional dalam proses pembagian warisan. Anak perempuan menjadi pihak yang paling banyak mengalokasikan sumber daya pribadi untuk memastikan kesejahteraan orang tua pada masa lanjut usia. Mereka sering kali harus menyesuaikan aktivitas pekerjaan, mengurangi kesempatan memperoleh pendapatan, bahkan menunda kepentingan pribadi demi memenuhi kebutuhan orang tua. Namun dalam proses distribusi warisan, pengorbanan tersebut tidak menjadi dasar yang signifikan dalam menentukan besaran hak yang diterima. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan antara kontribusi yang diberikan dan manfaat ekonomi yang diperoleh setelah orang tua meninggal dunia.

Temuan tersebut menunjukkan dominannya paradigma keadilan formal dalam praktik pewarisan keluarga. Pembagian warisan lebih banyak didasarkan pada kedudukan formal sebagai ahli waris daripada mempertimbangkan kontribusi nyata yang diberikan selama masa hidup pewaris.²¹ Dari perspektif keadilan distributif, kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi manfaat belum sepenuhnya mempertimbangkan beban dan pengorbanan yang ditanggung masing-masing anggota keluarga. Anak perempuan yang menjalankan fungsi caregiving dalam jangka waktu panjang berada pada posisi yang berbeda dibandingkan anggota keluarga lain yang tidak terlibat secara langsung dalam perawatan orang tua. Oleh karena itu, perlakuan yang sama dalam pembagian warisan belum tentu menghasilkan keadilan yang substantif.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa rendahnya pengakuan terhadap kontribusi caregiving berkaitan erat dengan budaya patriarki yang masih memengaruhi relasi keluarga.

²¹ Santoso Haris, Farida Annikmah, And Irawan Rudi, "Harta Waris Turunan Perspektif Hukum Waris Islam Studi Kasus Di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah," *Bulletin Of Islamic Law Vpcedumenu: CV. Creative Tugu Pena* 1, No. 1 (2024): 47–58.

Dalam konstruksi budaya tersebut, perawatan orang tua dipandang sebagai tugas alami perempuan sehingga pengorbanan yang dilakukan dianggap sebagai bentuk bakti yang tidak memerlukan kompensasi. Perspektif ini menyebabkan kerja perawatan kehilangan nilai ekonominya dan hanya dipahami sebagai kewajiban moral. Akibatnya, meskipun anak perempuan telah memberikan kontribusi yang besar terhadap kesejahteraan orang tua dan keluarga, posisi mereka dalam pembagian sumber daya ekonomi tetap tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Dalam perspektif *ethics of care*, kondisi tersebut menunjukkan kegagalan keluarga dalam mengakui nilai sosial dari kerja perawatan.²² Aktivitas caregiving sesungguhnya merupakan bentuk kontribusi yang memungkinkan keberlangsungan kehidupan keluarga dan meningkatkan kualitas hidup orang tua pada masa tua. Oleh karena itu, mengabaikan kontribusi tersebut dalam pembagian warisan berarti mengabaikan salah satu bentuk kerja yang paling fundamental dalam kehidupan keluarga. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa ketidakadilan warisan terhadap anak perempuan bukan hanya berkaitan dengan pembagian aset, tetapi juga berkaitan dengan kegagalan sistem keluarga dalam memberikan pengakuan terhadap kerja perawatan yang selama ini menopang kesejahteraan keluarga.

Berdasarkan keseluruhan temuan, dapat disimpulkan bahwa tidak proporsionalnya pengakuan terhadap kontribusi caregiving anak perempuan merupakan hasil interaksi antara budaya patriarki, dominasi keadilan formal, dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Anak perempuan memikul tanggung jawab yang lebih besar dalam merawat orang tua, tetapi kontribusi tersebut tidak memperoleh penghargaan yang setara dalam pembagian warisan. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kewajiban dan hak yang diterima perempuan dalam keluarga. Oleh karena itu, upaya mewujudkan keadilan dalam pewarisan perlu mempertimbangkan kontribusi caregiving sebagai salah satu aspek penting dalam distribusi harta keluarga agar tercipta keadilan yang lebih substantif dan proporsional.

Mekanisme Reproduksi Ketidakadilan Gender dalam Distribusi Warisan Keluarga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakadilan gender dalam distribusi warisan keluarga tidak terjadi secara spontan pada saat pembagian harta dilakukan, melainkan merupakan hasil dari proses sosial yang berlangsung secara terus-menerus dalam relasi keluarga.²³ Sejak awal, anak perempuan dibentuk melalui konstruksi budaya untuk menjalankan peran domestik dan perawatan, sementara anak laki-laki lebih diarahkan pada

²² Harpandi Rahim, Nilawati Uly, and Andi Alim, "Withholding Dan Withdrawing Life Support Therapy: Tinjauan Literatur Hukum, Etik, Dan Sosial Kesehatan," *Borneo Nursing Journal (BNJ)* 7, no. 2 (2025): 361–74.

²³ Anjar Kususiyanah, "Keadilan Gender Dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 9, no. 1 (2021): 63–82.

peran publik dan kepemilikan sumber daya ekonomi. Dalam kasus-kasus yang ditemukan dalam penelitian ini, anak perempuan menjadi pihak yang paling banyak terlibat dalam merawat orang tua pada masa lanjut usia, sedangkan anak laki-laki relatif memiliki keterlibatan yang lebih terbatas. Namun ketika pembagian warisan dilakukan, kontribusi caregiving tersebut tidak menjadi faktor utama dalam distribusi harta keluarga. Situasi ini menunjukkan adanya mekanisme reproduksi ketidakadilan yang bekerja secara sistematis melalui pembagian peran berbasis gender dalam keluarga. Fenomena serupa ditemukan dalam berbagai masyarakat patriarkal yang menempatkan perempuan sebagai pelaksana utama kerja perawatan tetapi tidak selalu memperoleh akses yang setara terhadap aset keluarga.

Mekanisme reproduksi ketidakadilan tersebut diawali oleh proses sosialisasi gender dalam keluarga. Anak perempuan sejak kecil dibiasakan untuk membantu pekerjaan domestik, merawat anggota keluarga yang sakit, dan menunjukkan sikap pengabdian kepada orang tua. Sebaliknya, anak laki-laki lebih sering dibentuk untuk mempersiapkan diri sebagai pencari nafkah dan penerus keluarga. Akibatnya, ketika orang tua memasuki usia lanjut, ekspektasi sosial secara otomatis mengarahkan tanggung jawab perawatan kepada anak perempuan. Kondisi ini menyebabkan caregiving dipandang sebagai kewajiban moral perempuan, bukan sebagai bentuk kontribusi yang memiliki nilai sosial dan ekonomi. Proses sosialisasi tersebut menjadi fondasi utama yang memungkinkan ketimpangan gender direproduksi dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Tahap berikutnya dari reproduksi ketidakadilan terjadi melalui normalisasi kerja perawatan perempuan. Dalam keluarga, pengorbanan waktu, tenaga, kesehatan, dan kesempatan ekonomi yang dilakukan anak perempuan sering dianggap sebagai bentuk bakti yang wajar. Karena dipersepsikan sebagai kewajiban moral, kontribusi tersebut tidak dihitung sebagai investasi sosial yang layak memperoleh kompensasi ekonomi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun anak perempuan menjadi *primary caregiver* selama bertahun-tahun, keluarga tetap memandang perawatan sebagai bagian dari tanggung jawab alamiah perempuan. Mekanisme ini memperlihatkan bagaimana budaya patriarki bekerja melalui dominasi simbolik yang membuat ketimpangan diterima sebagai sesuatu yang normal dan tidak dipersoalkan oleh anggota keluarga sendiri.

Ketidakadilan gender semakin direproduksi ketika proses pembagian warisan tetap berorientasi pada struktur kekuasaan yang telah terbentuk sebelumnya. Dalam beberapa kasus penelitian, pembagian warisan lebih banyak mempertimbangkan status anak laki-laki sebagai penerus keluarga dibandingkan kontribusi nyata yang diberikan anak perempuan selama masa

hidup orang tua.²⁴ Dengan demikian, hak ekonomi tidak didasarkan pada prinsip kontribusi, melainkan pada identitas gender dan posisi sosial dalam keluarga. Akibatnya, anak perempuan yang telah mengorbankan banyak sumber daya untuk merawat orang tua tetap menerima bagian yang sama atau bahkan lebih kecil dibandingkan saudara laki-lakinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi warisan menjadi instrumen yang memperkuat kembali ketimpangan gender yang telah terbentuk sebelumnya.²⁵

Mekanisme reproduksi ketidakadilan tersebut juga diperkuat oleh keberadaan *living law* yang hidup dalam masyarakat. Norma keluarga yang berkembang secara turun-temurun mengajarkan bahwa anak perempuan harus merawat orang tua tanpa mengharapkan imbalan apa pun. Pada saat yang sama, hak atas aset keluarga lebih banyak dikaitkan dengan laki-laki sebagai penerus garis keluarga. Norma tersebut tidak selalu tertulis dalam aturan formal, tetapi memiliki kekuatan sosial yang sangat besar karena diterima sebagai nilai budaya yang harus dipatuhi. Akibatnya, ketimpangan dalam pembagian warisan memperoleh legitimasi sosial yang kuat sehingga sulit dipandang sebagai bentuk ketidakadilan. Dengan kata lain, hukum yang hidup dalam masyarakat tidak hanya mengatur perilaku keluarga, tetapi juga menjadi sarana reproduksi ketimpangan gender dalam distribusi sumber daya keluarga.²⁶

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakadilan warisan tidak semata-mata berasal dari aturan hukum tertentu, melainkan dari interaksi antara budaya patriarki, norma keluarga, pembagian kerja berbasis gender, dan struktur kepemilikan aset yang saling memperkuat satu sama lain. Relasi tersebut menghasilkan siklus yang berulang: perempuan dibebani tanggung jawab perawatan, kontribusinya tidak diakui sebagai nilai ekonomi, kemudian mereka menerima akses yang lebih rendah terhadap sumber daya keluarga.²⁷ Siklus tersebut selanjutnya menjadi contoh bagi generasi berikutnya sehingga pola ketidakadilan yang sama terus direproduksi dalam keluarga.

Temuan ini memiliki kebaruan (*novelty*) yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Sebagian besar studi terdahulu memfokuskan perhatian pada ketimpangan bagian warisan antara laki-laki dan perempuan atau pada konflik antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara. Penelitian ini menunjukkan bahwa akar ketidakadilan justru berada pada fase sebelum pembagian warisan dilakukan, yaitu pada proses reproduksi kewajiban caregiving yang dibebankan secara tidak proporsional kepada anak perempuan. Dengan demikian,

²⁴ Firza Fikri Rabbani, Muhammad Ardan, and Kendra Kaulika Aliyah, "Problematisasi Pembagian Waris Adat Pada Kekerabatan Patrilineal," *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 4, no. 2 (2024): 42–49.

²⁵ Rahmayanty et al., "Ketidaksetaraan Gender Dalam Sistem Patrilineal."

²⁶ Habibullah Habibullah, "Kesetaraan Dalam Warisan Keluarga: Mengkritisi Bias Gender Dalam Hukum Waris," *MUDABBIR Journal Research and Education Studies* 5, no. 1 (2025): 493–506.

²⁷ Meilianna, Sitohang, and Aini, "Gender Inequality, Unpaid Care Work, And Working Women: Strengthening Indonesian Women's Role Within The Family Economy."

penelitian ini menawarkan konsep baru berupa “caregiving-based inheritance inequality”, yaitu ketidakadilan warisan yang lahir karena kontribusi perawatan perempuan tidak dikonversi menjadi pengakuan ekonomi dalam distribusi aset keluarga. Konsep ini memperluas kajian hukum keluarga dan gender dengan menunjukkan bahwa ketimpangan warisan merupakan hasil dari akumulasi ketimpangan kerja perawatan yang berlangsung sepanjang siklus kehidupan keluarga, bukan semata-mata akibat aturan pembagian warisan pada saat pewaris meninggal dunia.

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa mekanisme reproduksi ketidakadilan gender dalam distribusi warisan keluarga berlangsung melalui empat tahapan utama, yaitu sosialisasi peran gender, feminisasi kerja perawatan, normalisasi pengorbanan perempuan, dan distribusi aset yang tetap berorientasi pada struktur patriarki. Proses tersebut menyebabkan kontribusi caregiving anak perempuan tidak memperoleh pengakuan yang proporsional dalam pembagian warisan. Oleh karena itu, upaya mewujudkan keadilan warisan tidak cukup dilakukan melalui reformasi aturan pembagian harta semata, tetapi juga memerlukan perubahan cara pandang keluarga terhadap nilai ekonomi dan sosial dari kerja perawatan yang selama ini dijalankan oleh perempuan.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban filial dalam keluarga dibentuk oleh konstruksi sosial dan budaya yang menempatkan anak perempuan sebagai pihak utama yang bertanggung jawab merawat orang tua lanjut usia. Posisi tersebut menyebabkan mereka memikul beban perawatan yang lebih besar dibandingkan anggota keluarga lainnya, baik secara fisik, emosional, sosial, maupun ekonomi. Meskipun kontribusi *caregiving* menuntut pengorbanan signifikan dalam bentuk waktu, tenaga, kesehatan, pendidikan, peluang karier, dan sumber daya finansial, kontribusi tersebut belum memperoleh pengakuan yang proporsional dalam pembagian warisan. Kondisi ini dipengaruhi oleh dominasi sistem kekerabatan patrilineal, norma adat, nilai-nilai patriarki, serta *living law* yang lebih mengutamakan status formal sebagai ahli waris daripada kontribusi nyata terhadap kesejahteraan keluarga.

Akibatnya, anak perempuan mengalami ketidakadilan ganda: menanggung beban perawatan yang lebih besar sekaligus memperoleh manfaat ekonomi yang relatif lebih kecil dari warisan. Ketidakadilan tersebut mereproduksi ketimpangan gender melalui sosialisasi peran gender, feminisasi *care work*, dominasi patriarki, dan praktik hukum yang hidup dalam masyarakat.

Penelitian ini memperkenalkan konsep *Caregiving-Based Inheritance Inequality* sebagai bentuk ketidakadilan waris yang muncul akibat tidak diakuinya kontribusi perawatan sebagai dasar pertimbangan ekonomi dalam pembagian warisan. Konsep ini menegaskan bahwa keadilan waris tidak semata-mata berkaitan dengan distribusi harta berdasarkan status formal ahli waris, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai sosial, ekonomi, dan moral dari kerja perawatan. Temuan ini mendorong pengembangan hukum waris yang lebih responsif gender dengan mengintegrasikan nilai *care work* sebagai pertimbangan keadilan substantif dalam keluarga.

Referensi

- Arrasyid, Husain Fadhil, Habib Shulton Asnawi, and Habib Ismail. "Nilai-Nilai Falsafah Jawa Sepikul Segendongan Terhadap Dinamika Pembagian Waris Perspektif Teori Hudud (Studi Kasus Di Desa Balekencono Kecamatan Batanghari)." *Berkala Hukum, Sosial Dan Agama* 2, no. 1 (2025): 200–211.
- Beach, Scott R, and Richard Schulz. "Family Caregiver Factors Associated with Unmet Needs for Care of Older Adults." *Journal of the American Geriatrics Society* 65, no. 3 (2017): 560–66.
- Brown, David. "Pierre Bourdieu's 'Masculine Domination' Thesis and the Gendered Body in Sport and Physical Culture." *Sociology of Sport Journal* 23, no. 2 (2006): 162–88.
- Bueno, Michael V, and Jo-Ana D Chase. "Gender Differences in Adverse Psychosocial Outcomes among Family Caregivers: A Systematic Review." *Western Journal of Nursing Research* 45, no. 1 (2023): 78–92.
- Delu, Abidah R. "Women's Strategies For Negotiating Gender Socialization Based On Religious Values In The Modern Family." *Referensi Islamika: Jurnal Studi Islam* 4, no. 2 (2026): 264–77.
- Firdawaty, Linda, Habib Shulton Asnawi, and Siti Mahmudah. "Semanda Lekok in the Sai Batin Community, Lampung: Wife's Domination of Marital Assets from Maqāsid Al-Shari'ah Perspective." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 3 (2024): 1734–62.
- Habibullah, Habibullah. "Kesetaraan Dalam Warisan Keluarga: Mengkritisi Bias Gender Dalam Hukum Waris." *MUDABBIR Journal Research and Education Studies* 5, no. 1 (2025): 493–506.
- Handayani, Arri. *Gender, Karier, Dan Kesejahteraan Keluarga: Dinamika Perempuan Dalam Lensa Psikologi*. Deepublish, 2025.
- Haris, Santoso, Farida Annikmah, And Irawan Rudi. "Harta Waris Turunan Perspektip Hukum Waris Islam Studi Kasus Di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah." *Bulletin Of Islamic Law Ученые Записки: Креативная Труды Pena* 1, no. 1 (2024): 47–58.
- Heriandita, Syifa Mutiara Putri, Farah Farouk Alwyni, Mohammad Izdiyan Muttaqin, and Mulawarman Hannase. "The Role of Islamic Inheritance Law with a Maqasid Al-Shariah Approach in Addressing the Challenges of Social Justice for Women." *AJIS: Academic*

Journal of Islamic Studies 10, no. 1 (2025): 231–52.

- Ismail, Habib, Hasyim Asy'ari, and Agus Setiawan. "Hak Waris Anak Laki-Laki Tertua Dalam Hukum Adat Lampung Pepadun Perspektif Gender (Studi Di Tegineneng Kabupaten Pesawaran)." *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2019): 56–67.
- Kharima, Nadya, Nurul Kamaliah Umasangaji, Rosnida Sari, Andi Hikmawati Yunus, Mike Makahenggang, Deti Mulyo Harsono, Rosmita Rosmita, Ade Fristy Syahara, Rahmad Hidayat, and Sri Yani Kusumastuti. *Perempuan Dalam Struktur Sosial Modern*. Star Digital Publishing, 2026.
- Kususiyanah, Anjar. "Keadilan Gender Dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 9, no. 1 (2021): 63–82.
- Meilianna, Ruth, Marya Yenita Sitohang, and Yulinda Nurul Aini. "Gender Inequality, Unpaid Care Work, And Working Women: Strengthening Indonesian Women's Role Within The Family Economy." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 24, no. 1 (2025): 120–32.
- Owusu-Kwarteng, Afua, Cynthia Forson, Olufunmilola Dada, and Sarah Jack. "A Symbolic Violence Approach to Gender Inequality in Academia." *Gender, Work & Organization* 32, no. 1 (2025): 436–57.
- Park, Hong-Jae. "Does Filial Piety Still Matter? A Filiality-Based Perspective on Intergenerational Solidarity and Cooperation." *Journal of Intergenerational Relationships* 19, no. 1 (2021): 78–91.
- Priandana, Nugraha Gading, Muhammad Rizky Al-Farizi, Ira Kurniawan, Lanang Maulana, Rhaina Rifka Nefindia, Salma Tabina, Muhammad Mona Adha, Febra Anjar Kusuma, and Putut Ary Sadewo. "Pendekatan Teoritikal Dalam Sosiologi Hukum Terhadap Dinamika Kepatuhan Masyarakat." *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 3 (2026): 4181–88.
- Rabbani, Firza Fikri, Muhammad Ardan, and Kendra Kaulika Aliyah. "Problematisasi Pembagian Waris Adat Pada Kekerabatan Patrilineal." *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 4, no. 2 (2024): 42–49.
- Rahim, Harpandi, Nilawati Uly, and Andi Alim. "Withholding Dan Withdrawing Life Support Therapy: Tinjauan Literatur Hukum, Etik, Dan Sosial Kesehatan." *Borneo Nursing Journal (BNJ)* 7, no. 2 (2025): 361–74.
- Rahmayanty, Dinny, Novitri Wulandari, M Reza Pratama, and Natalia Putri. "Ketidaksetaraan Gender Dalam Sistem Patrilineal." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 6513–22.
- Rahmiati, Rahmiati, Abdul Aziz Muslim, Khairunnisa Khairunnisa, and Gusti Muhammad Raja Putra Perdana. "Banjar Customary Law as a Living Law: An Ehrlichian Analysis of Consensus-Based Dispute Resolution and Social Restoration." *Anterior Jurnal* 25, no. 1 (2026): 189–91.
- Schulz, Richard, Scott R Beach, Sara J Czaja, Lynn M Martire, and Joan K Monin. "Family Caregiving for Older Adults." *Annual Review of Psychology* 71, no. 1 (2020): 635–59.
- Stoyanov, Svetoslav Ivanov. "A Theory of Justice of John Rawls." NotaBene, 2022.
- Walby, Sylvia. "Varieties of Gender Regimes." *Social Politics: International Studies in Gender, State and Society* 27, no. 3 (2020): 414–31.